

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Indonesia memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2 persen dari total potensi produksi ikan laut dunia<sup>1</sup>. Potensi budidaya laut yang dimiliki Indonesia seluas 8.363.501 ha, akan tetapi yang terealisasi baru seluas 74.543 ha. Begitu pula dengan potensi tambak seluas 1.224.076 ha, baru dapat terwujud seluas 612.530 ha<sup>2</sup>.

Pada perikanan budidaya, kebutuhan pakan yang masih tergantung dengan impor dari negara lain, sebagian besar usaha perikanan budidaya di Indonesia belum menerapkan *good aquaculture practices*, sehingga aktivitasnya berdampak pada degradasi lingkungan yang cukup signifikan, yang akhirnya menimbulkan masalah penyakit, kematian massa, dan juga terjadinya pencemaran, baik dari limbah sisa pakan maupun dari limbah penggunaan obat-obatan yang tidak tepat jenis dan dosis yang digunakan, masih sering terjadinya konversi lahan yang tidak sesuai dengan bentuknya, sehingga sering menjadi ancaman langsung maupun

---

<sup>1</sup>Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

<sup>2</sup>Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, op.cit., hlm. 51

tidak langsung bagi keberlanjutan usaha perikanan budidaya, dan ketersediaan induk ikan masih sangat terbatas<sup>3</sup>.

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disisi lainnya terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pembudidayaan ikan. Isu-isu tersebut berkaitan dengan pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan perikanan budidaya agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan yang tetap menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Budidaya ikan termasuk dalam usaha akuakultur (didalam air) dan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa usaha ini cukup beresiko, bahkan risikonya lebih besar dibandingkan pada usaha peternakan dan pertanian. Anggapan ini didasarkan bahwa usaha budidaya ikan yang dilakukan dalam air sehingga tidak mudah dilihat dan dikontrol oleh manusia. Selain faktor pada media budidaya, variasi penyebab dari kegagalan budidaya sangat beragam, seperti polusi, penyakit, keracunan pakan, gangguan suplai air, kerusakan mesin dan peralatan, kerusakan wadah budidaya, kontinuitas suplai benih yang terbatas, fluktuasi cuaca yang ekstrim, predator, kerusakan sumber energi listrik, kelalaian pada pekerja, dan bencana alam. Resiko juga dipengaruhi oleh tingkat teknologi

---

<sup>3</sup>Kementerian PPN Bappenas, Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, (Direktorat Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014), hal 2

budidaya, dalam hal ini semakin intensif teknologi yang digunakan, maka resiko pada kegagalan semakin besar. Dalam semua persoalan ini dan berbagai problematika yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan membutuhkan dana yang relatif besar dalam pengelolaannya<sup>4</sup>.

Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 17,74 juta Ha, yang terdiri atas lahan budidaya air tawar 2,23 juta Ha, budidaya air payau 2,96 juta Ha dan budidaya laut 12,55 juta Ha. Sedangkan pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru mencapai 16,62 % untuk budidaya air tawar, 50,06 % untuk budidaya air payau dan 2,09 % untuk budidaya laut<sup>5</sup>. Oleh karena itu peluang produksi perikanan budidaya masih sangat luas.

Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama pada budidaya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budidaya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budidaya harus disertai dengan peningkatan serapan dari pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Masyarakat Pesisir Selatan memiliki mata pencaharian yang sangat bergantung kepada hasil laut dan budidaya yaitu dengan menjadi nelayan dan kelompok budidaya. Hal ini sangat lumrah mengingat masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir selatan membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan

---

<sup>4</sup>Arif Sujoko, Analisis Investasi untuk Akuakultur, (Surabaya: Ikatan Alumni Sekolah Perikanan, 2017), hal.19

<sup>5</sup>Kementerian dan Kelautan RI, Peluang Usaha Budidaya, (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Usaha Budidaya, 2009), hal. 5

ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir<sup>6</sup>. Artinya, masyarakat pesisir ialah orang-orang yang bertempat tinggal di daerah pesisir yang memiliki mata pencaharian dengan bergantung kepada sumberdaya yang ada di sekitar kawasan pantai. Berikut ini Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	90.136	44,63
2	Indrustri Pengolahan	11.889	5,88
3	Perdagangan Besar,Eceran, Rumah Makan dan Hotel	51.739	25,62
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	28.649	14,18
5	Lainnya (pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	19.569	9,69
	Jumlah	201.982	100

Sumber : Dokumen BPS, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang telah memiliki lapangan pekerjaan berjumlah 201.982 juta penduduk, dimana pekerjaannya yang paling banyak diminati oleh masyarakat pesisir selatan adalah pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yang berjumlah 90.136 juta penduduk. Jadi dapat dikatakan bahwa hampir dari setengah masyarakat pesisir selatan yang memilih pekerjaan di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat pesisir selatan mata pencahariannya dari hasil laut dan

<sup>6</sup>Satria,Arif, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, Bogor, IPBPress, 2009, hlm. 24

budidaya ikan dengan menjadi kelompok budidaya. Dengan potensi budidaya ikan ini maka dibutuhkan lokasi potensi budidaya Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini lokasi potensi budidaya yang terdapat di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan:

**Tabel 1.2 Lokasi Potensi Budidaya Ikan**

Kab/Kota	Lokasi Potensi Budidaya
<b>Kabupaten Pesisir Selatan</b>	Sungai Pinang, Sungai Nipah, Mandeh, Sungai Bungin, dan Teluk Kasai

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat 2019

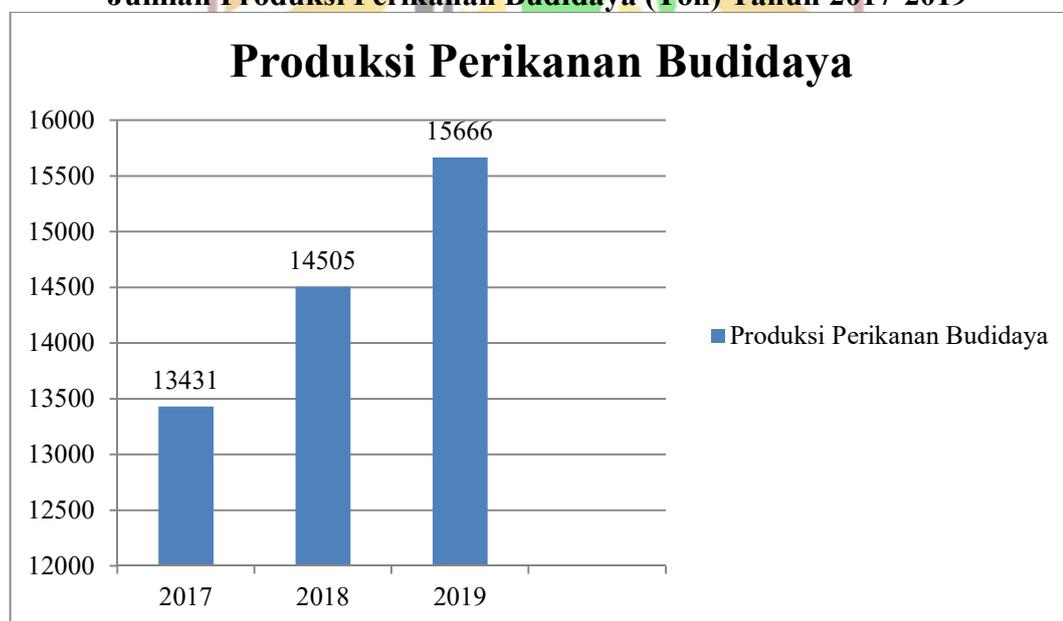
Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa lokasi potensi budidaya ikan di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat di beberapa lokasi yaitu Sungai Pinang, Sungai Nipah, Mandeh, Sungai Bungin, dan Teluk Kasai. Keberadaan lima lokasi budidaya perikanan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan produksi perikanan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada potensi budidaya ikan terdapat tiga wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pembudidayaan. Diantaranya, yaitu wilayah perairan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, Sungai Nipah Kecamatan IV Jurai, dan Perairan Sungai Bungin Kecamatan Batang Kapas.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 15 kecamatan, diantaranya 10 kecamatan berada di wilayah pesisir dan 5 kecamatan berada di daerah daratan yang rata-rata berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan budidaya (pembesaran dan pembenihan ikan air tawar) serta potensi perikanan budidaya. Namun potensi tersebut belum dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena masyarakat masih memiliki kendala dalam mendapatkan modal kerja dan operasional selama melakukan pembudidayaan ikan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2019 lebih fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, dan memperluas kawasan budidaya ikan untuk meningkatkan ketersediaan benih ikan yang bermutu didaerah Pesisir Selatan. Potensi dan luas perairan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) cukup besar. Jika dikelola secara baik dan terorganisir maka akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengelola budidaya ikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya manajemen program untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2017-2019:

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2017-2019**



*Sumber : Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan 2019*

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2017-2019 merupakan hasil dari target Dinas Perikanan

untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam mencapai suatu target pada program tersebut sudah berjalan dengan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah hanya saja Dinas Perikanan yang menjalankan program tersebut. Sebelum meningkatnya produksi perikanan budidaya ini terdapat beberapa kelompok budidaya yang sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan untuk menjalankan program produksi perikanan budidaya.

Walaupun mengalami peningkatan pada produksi perikanan budidaya masyarakat pesisir selatan masih memiliki berbagai permasalahan dalam kehidupan mereka diantara lemahnya pendistribusian hasil budidaya, lemahnya organisasi, lemahnya teknologi dan modal, terbatasnya SDM, terbatasnya akses sumber daya, serta ketidakadilan harga<sup>7</sup>.

Hal ini menyebabkan sebagian besar kelompok budidaya Pesisir Selatan berkualitas relatif rendah, karena menjadi kelompok budidaya tidak dibutuhkan persyaratan atau keterampilan tertentu. Sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam pembudidayaan ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya masih sangat terbatas.

Permasalahan yang ada di Dinas Perikanan ini terkait dengan peningkatan produksi perikanan budidaya adalah masalahnya pada benih, karena benih masih didatangkan dari luar kabupaten Pesisir Selatan dan harga pakan yang terlalu tinggi sehingga Dinas Perikanan mengajak kelompok pembudidaya ikan untuk membuat pakan sendiri agar kelompok pembudidaya ikan memenuhi pakan dalam

---

<sup>7</sup>ibid.

perikanan budidaya untuk meningkatkan perekonomian kelompok pembudidaya ikan. Permasalahan pada program peningkatan produksi perikanan budidaya ada dua yaitu :

1. Benih, dimana benih ikan tersebut didatangkan dari luar provinsi yang mengakibatkan benih ikan tersebut ada yang beberapa mati saat sampai di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Harga Pakan Ikan, harga layak pakan ikan sebesar Rp.10.000-13.000/kg dan harga pakan ikan yang beredar dipasaran sebesar Rp.18.000-22.000/kg, dimana terdapat selisih harga yang sangat besar yaitu antara Rp. 8.000-9.000/kg.

Untuk itu Dinas Perikanan mengajak kelompok pembudidaya ikan membuat pakan ikan dan benih ikan sendiri agar menurunkan biaya produksi dan meningkatkan perekonomian kelompok pembudidaya ikan.

Program Peningkatan Produksi Perikanan yang sudah terealisasi pada tahun 2017-2018 yang merupakan jumlah dari produksi perikanan budidaya yang mana tidak sesuai dengan target yang sudah di rancang oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini adalah Tabel Produksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2018:

**Tabel 1.3**  
**Produksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2017-2018**

No	Kecamatan	Produksi Perikanan Per Tahun			
		Target (Ton)		Realisasi (Ton)	
		2017	2018	2017	2018
1	Silaut	362,17	399,28	255,40	265,70
2	Lunang	409,65	451,63	386,65	389,76
3	Ranah Ampek Hulu Tapan	353,30	389,5	328,12	332,40

4	Basa IV Balai Tapan	275,30	309,29	270,80	298,75
5	Pancung Soal	396,48	437,11	352,90	386,50
6	Air Pura	395,20	435,7	375,30	389,67
7	Linggo Sari Baganti	658,57	732,97	597,35	495,75
8	Ranah Pesisir	697,26	768,72	639,45	492,25
9	Lengayang	1.168,12	1.215,52	1.112,50	1.321,50
10	Sutera	1.342,58	1.470,18	1.378,65	1.456,55
11	Batang Kapas	1.197,37	1.257,70	1.145,55	1.185,65
12	IV Jurai	1.398,54	1.541,88	1.332,90	1.386,65
13	Bayang	1.153,85	1.272,11	1.088,54	1.123,76
14	IV Nagari Bayang Utara	1.045,33	1.152,46	995,56	885,59
15	Koto XI Tarusan	2.577,28	2.670,95	2.454,56	2.766,75
<b>Jumlah</b>		<b>13.431,00</b>	<b>14.505,00</b>	<b>12.714,23</b>	<b>13.177,23</b>

Sumber: Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa target sama realisasi pada program produksi perikanan budidaya adalah yang mencapai target pada tahun 2017 target sebanyak 13.431 ton yang sudah direalisasikan sebanyak 12.714 ton dan di tahun 2018 produksi perikanan budidaya tidak mencapai target di karenakan kurangnya penggerakan dari Dinas perikanan sehingga target 2018 tidak tercapai. Pada tahun 2017 target produksi perikanan budidaya sebanyak 14.505 ton yang sudah terealisasikan sebanyak 13.177 ton.

Dengan demikian, apabila mengacu pada data produksi perikanan budidaya dua tahun terakhir, dijelaskan bahwasannya target yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tidak pernah mencapai 100 %. Padahal jumlah kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan cukup banyak.

Berikut ini adalah Tabel Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pesisir Selatan:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Pokdakan	Jumlah Pembudidaya
1	Koto XI Tarusan	16	Pokdakan	279 orang
2	Bayang	3	Pokdakan	31 orang
3	IV Jurai	26	Pokdakan	238 orang
4	Batang Kapas	9	Pokdakan	93 orang
5	Sutera	4	Pokdakan	54 orang
6	Lengayang	13	Pokdakan	184 orang
7	Ranah Pesisir	6	Pokdakan	76 orang
8	Linggo Sari Baganti	3	Pokdakan	33 orang
9	Pancung Soal	13	Pokdakan	152 orang
10	Air Pura	6	Pokdakan	81 orang
11	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	Pokdakan	153 orang
12	Basa Ampek Balai Tapan	2	Pokdakan	27 orang
13	Silaut	4	Pokdakan	67 orang
	Total	115		<b>1.468</b>

*Sumber: Dokumen Data Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019*

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 115 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), jumlah kelompok pembudidaya ikan tertinggi di kecamatan IV Jurai sebanyak 26 pokdakan yang berjumlah 238 orang, jumlah pembudidaya yang paling banyak di kecamatan Koto XI Tarusan berjumlah 279 orang dan memiliki 16 pokdakan. Jumlah pembudidaya paling terendah berada di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang berjumlah 27 orang dan memiliki 2 pokdakan. Dengan jumlah kelompok pembudidaya ikan per-kecamatan yang cukup besar, seharusnya target produksi perikanan budidaya dapat tercapai.

Pada permasalahan ini salah satu penyebab dari target yang diberikan tersebut tidak tercapai dikarenakan kurangnya fungsi-fungsi pokok manajemen untuk program peningkatan produksi perikanan budidaya belum maksimal

dijalankan Dinas Perikanan. Beberapa indikasi bisa dilihat dari kurang matangnya perencanaan sehingga mengakibatkan tidak terserapnya anggaran dengan maksimal, minimnya motivasi dan kurangnya anggaran biaya untuk pakan ikan yang akan dibudidayakan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan, yang dimana pengawasan sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah kelompok pembudidaya ikan yang sedang dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar atau ada kendala yang terjadi dilapangan, seperti kurangnya tenaga kerja, kurangnya benih dan pakan ikan, lokasi budidaya ikan yang tidak memadai atau tenaga kerja kelompok pembudidaya ikan yang kurang kompeten dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Untuk itu, penting menelaah pelaksanaan manajemen program. Manajemen program sangat penting diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir, karena baik atau buruknya manajemen program akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program.

Salah satu dari program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang mendorong penambahan produksi perikanan budidaya sekaligus kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan adalah program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Program Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan(Aktif)</b>
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	a. Organisasi Pabrik Pengolahan Pakan Ikan b. Operasional BBI Pincuran Boga

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya</li> <li>d. Penanganan Hama dan Penyakit Ikan</li> <li>e. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)</li> <li>f. Demfarm Bioflog Budidaya Lele (DAK)</li> <li>g. Rehabilitasi Kantor BBI Pincuran Boga</li> <li>h. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya</li> <li>i. Demfarm Budidaya Rumput Laut (DAK)</li> <li>j. Percontohan Budidaya Ikan Sistem Bioflog</li> <li>k. Sosialisasi Izin Usaha dan Identifikasi Usaha Perikanan</li> <li>l. Pembinaan Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN)</li> <li>m. Pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)</li> <li>n. Pelatihan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)</li> <li>o. Demfarm Budidaya Udang Bersama Padi/Ugadi (DAK)</li> <li>p. Pengadaan Alat Pengolahan Pakan Ikan</li> <li>q. Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Perikanan Budidaya</li> <li>r. Demfram Budidaya Nila (DAK)</li> <li>s. Penyusunan Dokumen Potensi Budidaya Perikanan</li> </ul>
---	--

Sumber: Dokumen Data dan Informasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan 2019

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa program peningkatan produksi perikanan budidaya di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 19 kegiatan. Dari 19 kegiatan tersebut menunjukkan pencapaian kinerja secara umum rata-rata mencapai 68,54%. Hal ini berdasarkan angka keterserapan anggaran

dimana dari alokasi anggaran program peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar Rp 2.607.529.430,- hanya bisa direalisasi Rp 1.787.313.317,- pada Tahun 2019. Dengan demikian dapat dikatakan capaian kinerja program peningkatan produksi perikanan budidaya masih belum berjalan dengan baik. Dinas Perikanan dapat memberikan terhadap lima kegiatan yang ada pada program peningkatan produksi perikanan budidaya Tahun 2019. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan:

“...pada program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang memiliki 19 kegiatan, Namun dari 19 kegiatan ini ada 5 kegiatan pokok untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, yang dimaksud 5 kegiatan ini adalah Operasional Balai Benih Pincuran Boga, Pelatihan CBIB, Pelatihan CPIB, Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat, dan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan. Dari 5 kegiatan pokok ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya Kabupaten Pesisir Selatan” (Wawancara dengan Bapak Ir. Syafri Herfindo selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10.00-12.10)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang memiliki 19 kegiatan, namun dari 19 kegiatan ini ada 5 kegiatan pokok untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Kelima kegiatan pokok tersebut yakni (1) Operasional Balai Benih Pincuran Boga, (2) Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), (3) Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), (4) Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR), (5) Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Walaupun 5 kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dan telah ditetapkan menjadi prioritas, tetapi pencapaian kinerja tidak mencapai 100%. Hal ini menandakan ada

permasalahan dalam program ini khususnya terkait manajemen kegiatan-kegiatan prioritas yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari sisi perencanaan, anggaran yang diberikan terhadap lima kegiatan pokok pada program peningkatan produksi perikanan budidaya sudah cukup besar sebesar Rp. 306.051.750,- dengan realisasi anggaran Rp. 265.007.336,- atau 86,59 % . adapun rincian perkegiatan sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Program Anggaran Produksi Perikanan Budidaya Dengan Target Produksi**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

No	Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Operasional BBI Pincuran Boga	181.296.000,-	154.610.936,-	Meskipun tidak tercapai disebabkan benih yang dihasilkan disetiap pemijahan kurang berkualitas karena induk jantan yang kurang unggul dan SDM petugas
2.	Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat(UPR)	33.856.350,-	31.738.000,-	Hal ini disebabkan sarana UPR yang belum menunjang proses pembenihan ikan yang baik, induk yang tidak unggul lagi.
3.	Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan(POKDAKAN)	52.746.200,-	52.106.000,-	target yang terbina sebanyak 54 pokdakan dari 70 pokdakan yang terinventarisir. Hal ini disebabkan pokdakan tersebut tidak aktif lagi karena kurang modal, sarana dan prasarana.
4.	Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	19.753.200,-	15.808.200,-	Melalui kegiatan ini terlatih 20 orang pembudidaya dengan harapan meningkatnya SDM dalam melaksanakan budidaya ikan dengan baik. Pada tahun 2019, pembudidaya yang mendapatkan sertifikat CBIB sebanyak 18 orang
5.	Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	18.400.000,-	10.744.200,-	melalui kegiatan ini terlatihnya 20 orang pembenih.
	<b>Jumlah</b>	<b>306.051.750,-</b>	<b>265.007.336,-</b>	

*Sumber: Dokumen Catatan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa anggaran pada program peningkatan produksi perikanan budidaya realisasinya tidak mencapai target sehingga berpengaruh terhadap hasil dari proses pembudidayaan ikan seperti, kuantitas hasil panen.

Dalam anggaran biaya Operasional BBI Pincuran Boga realisasi biaya anggaran yang diberikan kurang dari alokasi yang telah dianggarkan. Minimnya penyerapan anggaran ini dapat berdampak terhadap indukan ikan yang kualitasnya kurang unggul dan berdampak juga terhadap SDM petugas. Dimana ini dapat mempengaruhi hasil dari proses budidaya ikan yang dilakukan, kurangnya pada anggaran biaya ini juga dapat berdampak terhadap target budidaya ikan yang telah diberikan.

Untuk anggaran biaya pada Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) realisasi biaya anggaran yang diberikan kurang dari alokasi yang telah dianggarkan. Kurangnya anggaran ini sangat berpengaruh terhadap hasil budidaya ikan yang sedang dilakukan, dimana jika anggaran kurang maka akan berdampak pada proses pembenihan yang baik dan induk yang tidak unggul lagi.

Dalam anggaran Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) realisasi pada biaya anggaran yang diberikan hampir mencapai alokasi yang telah dianggarkan, tetapi sebaiknya alokasi biayanya dapat diberikan lebih karena terdapat 70 Pokdakan dan yang terbina hanya 54 Pokdakan, berarti ada 16 Pokdakan yang tidak aktif. Maka akan lebih baik jika anggaran biaya yang diberikan lebih sehingga dapat membuat 70 Pokdakan itu aktif semua. Jika 70 Pokdakan itu aktif maka akan menjadi salah satu factor yang dapat menunjang

keberhasilan pada budidaya ikan untuk mencapai target yang sudah direncanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk CBIB dan CPIB realisasi biaya anggaran yang diberikan kurang dari alokasi yang telah dianggarkan. Dimana fungsi dari anggaran ini sangat penting untuk anggaran ini difungsikan untuk melatih SDM dalam melaksanakan budidaya ikan dengan baik. Pada tahun 2019 dari 20 orang yang telah terlatih diantaranya 18 orang telah memiliki sertifikat CBIB. Jika anggaran yang diberikan lebih besar kemungkinan proses pembudidayaan ikan akan terlaksana dengan baik, serta dapat meningkatkan keberhasilan terhadap pembudidayaan ikan di 54 Pokdakan yang aktif.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya realisasi anggaran yang diberikan kurang dari alokasi, sehingga kekurangan ini berdampak negatif untuk proses pembudidayaan ikan yang mengakibatkan pembudidaya ikan tidak berjalan dengan baik. Tetapi juga realisasi anggaran yang diberikan jumlahnya sama dengan jumlah alokasi maka akan berdampak positif untuk proses pada pembudidayaan ikan, seperti bisa memiliki benih, pakan dan indukan ikan yang unggul atau bagus, dapat mengaktifkan 70 pokdakan serta dapat mempunyai SDM yang handal atau terlatih dibidangnya.

Dari sisi pengorganisasian, terdapat masalah kurangnya terkoordinirnya manajemen Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan:

“...kita kekurangan personil untuk turun ke lapangan yang melakukan pengawasan dilapangan, jadi pengawasannya tidak terlalu rutin dan kita hanya bisa memeriksa sarana dan prasarana semampunya saja. Sehingga program yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik dan mengakibatkan gagal panen.”(Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Bapak Dalmasar, S.Pi, 22 oktober 2019, pukul 15.10.)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masalah pada program peningkatan produksi perikanan budidaya ini dikarenakan kurangnya personil untuk turun kelapangan yang melakukan pengawasan dilapangan, dengan pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan hanya memeriksa sarana dan prasarana sehingga program yang telah direncanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlaksana dengan baik dan mengakibatkan gagal panen. Pada manajemen program peningkatan produksi perikanan budidaya ini yang mengatur tentang berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan agar perencanaan pada program itu mencapai target dan tujuan.

Pada program peningkatan produksi perikanan budidaya terdapat 3 indikator dimana masing-masing dari indikator tersebut memiliki kegiatan yang sudah di rencanakan oleh Dinas Perikanan dalam jangka waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2016-2021.

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana dan teknologi budidaya dengan indikator : Pendapatan Pembudidaya Ikan sebesar : Rp. 49.800.000 org/th pada tahun 2021
2. Meningkatnya Luas Kawasan Budidaya dengan indikator: Persentase Penambahan Luas Lahan Budidaya (ha) 80% pada tahun 2021

3. Meningkatnya Ketersediaan Benih Ikan Bermutu dengan indikator: Jumlah Produksi Benih Ikan Bermutu 60.000.000 ekor pada tahun 2021

Ketiga indikator diatas merupakan perencanaan untuk 5 tahun kedepan yang terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mencapai suatu target Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang telah di rencanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatandengan berpedoman pada dokumen-dokumen yang telah dirancang dan dilaksanakan semua kegiatan sehingga mencapai suatu target yang telah ditentukan dalam jangka 5 tahun.

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan turun lapangan untuk melihat para kelompok pembudidaya ikan melaksanakan kegiatan apa yang sudah diperintahkan atau arahan dari Dinas Perikanan. Berikut ini adalah kegiatan pada pembinaan kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan) pada Gambar 1.2 merupakan panen ikan kerapu di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019:

**Gambar 1.2**  
**Panen Ikan Kerapu di Kabupaten Pesisir Selatan**



*Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019*

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa salah satu kegiatan dari Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya oleh Dinas Perikanan

Kabupaten Pesisir Selatan yaitu kegiatan pada Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan. Kegiatan Pembinaan Kelompok Pembudidayaan Ikan ini terbagi atas kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan. Pembenihan merupakan kegiatan budidaya untuk menghasilkan benih dari kegiatan pemeliharaan, pemijahan dan pendederan. Pembesaran merupakan pemeliharaan ikan dari benih ke ukuran konsumsi. Budidaya ikan di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Budidaya Ikan Air Tawar dan Budidaya Ikan Laut. Komoditas air tawar diantaranya adalah lele, nila dan gurami, sedangkan komoditas budidaya laut adalah kerapu. Kegiatan budidaya dilakukan pada kolam terpal, kolam tanah, kolam beton dan keramba jaring apung<sup>8</sup>.

Sumber pendapatan kelompok budidaya tidak hanya dihasilkan melalui sumber daya perikanan tetapi juga melakukan usaha-usaha budidaya ikan di tambak, budidaya rumput laut dan pengolahan ikan tradisional. Kegiatan pembudidayaan ikan dan pengembangannya dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan karena hasil yang didapat dari budidaya saja belum mencukupi kebutuhan kehidupan mereka.

Salah seorang staff dari Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas

Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan mengungkapkan:

“...peningkatan jumlah pembudidaya ikan tahun 2019 mulai bergairah di Kabupaten Pesisir Selatan, karena tahun sebelumnya masih rendah dan masih banyak kelompok pembudidayaan yang hidup waktu mendapat bantuan saja. Pada tahun sekarang lah banyak yang sadar atas berbudidaya ikan. Tahun sebelumnya para kelompok pembudidaya ikan hanya mengandalkan bantuan dari Dinas Perikanan saja dan tidak ada keberlanjutan usaha kelompok

<sup>8</sup>dpk pesisir selatan, *mengenal budidaya ikan*, edisi jum'at, 24 mei 2019, berita *online* dalam <http://dkp.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/mengenal-budidaya-ikan>, diakses tanggal 27 Agustus 2019 pukul 18.59

pembudidaya ikan tersebut. Setelah habis panen tidak ada menebarkan benih baru dan dibiarkan begitu saja”. (Wawancara dengan Staff dari Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Bapak Randy, 7 Oktober 2019, pukul 13.00.)

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa masih kurangnya aktivitas kelompok budidaya pada tahun sebelum 2019 yang mana kelompok pembudidaya ikan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, namun semenjak 2019 mulai adanya tumbuh kesadaran dari kelompok budidaya dalam pengelolaan ditunjang juga oleh Dinas Perikanan yang turut serta dalam memberikan pelatihan wawasan pada setiap kelompok pembudidaya ikan agar para kelompok pembudidaya ikan bisa hidup mandiri tanpa menunggu bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan fokus untuk membenahi persoalan tersebut agar kelompok pembudidaya ikan betul-betul serius dalam bekerja. Dinas Perikanan ingin mengajak para penyuluh untuk membenahi diri bersama kelompok budidaya perikanan dari sisi sumber daya manusia. Bagaimana meningkatkan kualitas hasil budidaya perikanan. Untuk tambahan modal kelompok pembudidaya ikan, Dinas Perikanan melalui Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) akan memfasilitasi kelompok pembudidaya ikan ke pihak perbankan.

Pembudidaya ikan juga rentan terhadap permasalahan yang dapat mengakibatkan kemiskinan, mulai dari minimnya luas lahan tambak, kurangnya permodalan, tatacara pembudidayaan yang kurang baik, sampai dengan kesulitan mengolah dan memasarkan hasil budidaya perikanan.

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dilaksanakan dengan cara diberikannya paket budidaya ikan sesuai dengan jenis komoditi yang diajukan pada satu kelompok pembudidaya. Dimana sasarannya adalah kelompok pembudidaya ikan. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk perikanan serta meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan. Sehingga nantinya program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya ini bisa menggerakkan dan mendukung potensi ekonomi kelompok budidaya serta mampu mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan juga berimplikasi kepada peningkatan taraf perekonomian masyarakat di daerah Pesisir Selatan.

Pada Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan pengelolaannya dilaksanakan melalui manajemen kelompok kolektif. Kelompok tersebut ialah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang sebelumnya telah dibentuk dan disertai dengan komitmen masing-masing anggota untuk saling bekerjasama dimana setiap kelompok beranggotakan 10-25 orang dan memenuhi kriteria persyaratan kemudian mengajukan proposal untuk melaksanakan program tersebut. Pokdakan diidentifikasi oleh Tim Teknis kemudian diusulkan kepada Dinas Perikanan untuk diverifikasi kelompok yang dinyatakan layak/tidak layak.

Adapun usulan bantuan dari pemerintah sehingga Dinas Perikanan membagi kelompok per kecamatan kabupaten Pesisir Selatan yang benar-benar layak mengikuti program peningkatan produksi perikanan budidaya dalam mencapai suatu target oleh Dinas Perikanan untuk para kelompok pembudidayaan

ikan. Berikut ini adalah Tabel Usulan Bantuan Dari Pemerintah Untuk Kelompok Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 1.7**  
**Usulan Bantuan Dari Pemerintah**

No	Nama Kelompok	Kecamatan
1.	Mina Sakato	Airpura
2.	Muaro Sago	Iv Jurai
3.	Jembatan Gantung Pondok Baru	Kampung Tengah
4.	Lbs Saiyo	Lengayang
5.	Bungo Tanjuang	-
6.	Peduli Kawan	Linggo Saru Baganti
7.	Talang Serumpun	Bayang
8.	Berlian Samudera	Airpura
9.	Tabek Indah	Lengayang
10.	Koto Ranggo	Iv Jurai
11.	Usaha Maju Jaya	Ranah Pesisir

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa yang mendapatkan usulan bantuan dari pemerintah ada 11 kelompok per kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kelompok yang mendapatkan bantuan berdasarkan yang sudah mengajukan proposal melalui Dinas Perikanan dan sebelum mendapat bantuan tersebut harus mencek kelapangan dulu, kemudian bantuan apa yang layak di berikan apakah berupa benih lele, benih nila dan benih gurami. Jadi, tidak sembarang kelompok yang bisa mendapatkan bantuan. Kelompok budidaya yang sudah mengajukan proposal yang mendapatkan bantuan akan di seleksi kembali oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Perikanan juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan budidaya oleh pokdakan dari tahap produksi sampai pada pemasaran. Dalam keberlanjutan program, pokdakan yang menerima paket bantuan pada tahun sebelumnya diharapkan mampu untuk mengelola secara mandiri dan berkelanjutan dari penghasilan yang di dapat dalam mengelola

kebutuhan dari kelompoknya serta bagi pokdakan yang telah menerima paket bantuan pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa mendapatkan paket bantuan dari pusat pada periode berikutnya. Namun, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan akan memberikan bantuan melalui dana APBD dan DAK terhadap sebagian dari kekurangan kebutuhan yang diperlukan oleh pokdakan dan tetap dalam pendampingan serta memberikan laporan kemajuan kelompok.

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan gelar pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) di balai benih ikan Sungai Nipah. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 40 orang yang terdiri dari 30 orang anggota Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan sebanyak 10 orang dari PPL/PPB.

Kegiatan pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Pesisir Selatan. Kepala Dinas Perikanan Pesisir Selatan menjelaskan :

“...bahwa saat ini Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menggalakan program CBIB, dengan tujuan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Bapak Andi Syafinal, 21 September 2019 pukul 10.00.)

Berdasarkan wawancara diatas, terlihat bahwa program CBIB untuk menggalakan dengan tujuan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan hasil pembudidaya ikan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya ikan yang baik, menjadikan masyarakat pembudidaya yang sadar akan penerapan cara budidaya ikan yang baik dapat memberikan manfaat yang besar dan meningkatkan daya saingan produk perikanan yang bersertifikat.

Melalui pelatihan ini dengan melibatkan kelompok pembudidaya ikan, kita berharap program Pemerintah juga berjalan dengan baik di Pesisir Selatan, sehingga mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya sangat baik. Program tersebut merupakan penjabaran/implementasi dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), dengan adanya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik, diharapkan stigma-stigma tersebut dapat dihilangkan dan dapat meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat.

Untuk berhasilnya pembudidayaan ikan diperlukan benih yang berkualitas dan pelaksanaan budidaya yang memenuhi standarbudidaya yang baik. Untuk mendapatkan benih yang berkualitas diperlukan pembenihan yang menjalankan prosedur Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan untuk menghasilkan produksi yang maksimal diperlukan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bertujuan meningkatkan SDM pembudidaya ikan dalam melakukan budidaya ikan yang sesuai dengan SNI. Melalui kegiatan ini terlatih 20 orang pembudidaya dengan harapan meningkatnya SDM dalam melaksanakan budidaya ikan dengan baik. Pada tahun 2019, pembudidaya yang mendapatkan sertifikat CBIB sebanyak 18 orang.

Pelatihan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) bertujuan meningkatkan mutu benih ikan dan meningkatkan SDM pelaku pembenihan sesuai dengan CPIB. Melalui kegiatan ini terlatihnya 20 orang pembenih. Diharapkan dengan pelatihan akan berkembang Unit Pembenihan Rakyat sebagai mitra BBI dalam menghasilkan benih untuk memenuhi kebutuhan benih masyarakat.

Dengan mengintensifkan pembinaan terhadap UPR dan Pokdakan, maka CPIB dan CBIB serta pengendalian hama dan penyakit dapat ditingkatkan serta target IKU dapat terealisasi. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

“...untuk pokdakan yang sudah menerima bantuan berupa benih dan pakan yang memenuhi syarat bantuan yaitu sudah mengajukan proposal dengan persyaratan yang lengkap dan mempunyai berbadan hukum minimal akta notaris dan mempunyai kolam sendiri. Kalau program ini sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga jadi kelompok yang sudah menerima bantuan minimal sisakan yang sudah dibantu misalnya 30.000 ekor benih dan 2 ton pakan. Sisakan hasil panen itu untuk membeli bahan benih selanjutnya. Sebab, Pemerintah hanya memberikan 2 tahun jarak setelah diberi bantuan tersebut”. (Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Bapak Dalmasar Tanggal 14 Oktober 2019 pukul 11.30)

Berdasarkan Wawancara dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan mengajak kelompok pembudidaya ikan yang disebut Pokdakan untuk menghemat hasil panen dan juga untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah saja maupun dari Dinas Perikanan. Agar perencanaan dari target bisa tercapai dan meningkatkan hasil produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hal ini menjadi alasan peneliti untuk meneliti Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Fenomena yang terjadi dalam pembinaan teknis dan kelembagaan kepada kelompok pembudidaya ikan adalah seperti dalam penetapan kelompok pembudidayaikan yang diberikan pembinaan. Salah satu wawancara yang peneliti lakukan dengan Ajo Enek, salah seorang pokdakan mengatakan bahwa :

“...pokdakan yang mendapatkan pelatihan teknis dan kelembagaan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kedekatan dengan aparat nagari atau dengan petugas lapangan Dinas Perikanan, sedangkan kelompok lain tidak mendapatkan pelatihan” (Hasil wawancara dengan Ajo Enek, salah seorang pokdakan di Kambang Timur, Kecamatan Lengayang hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pada pukul 09.00-10.00).

Permasalahan lainnya yang terjadi seperti kelompok budidaya yang diberikan pembinaan hanya aktif ketika mendapatkan dana bantuan saja, artinya lembaga tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk menerima bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak berkelanjutan.

Agar anggaran yang direalisasikan untuk program peningkatan produksi perikanan budidaya ini tidak berjalan sia-sia dibutuhkan manajemen yang baik dalam pelaksanaannya. Manajemen dibutuhkan agar program yang akan dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan kegiatan non fisik berupa program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan menentukan serta menetapkan kegiatan yang ingin dilakukan seperti dengan menentukan waktu, prosedur, serta kebijakan-kebijakan yang nantinya berguna sebagai acuan dari perencanaan terhadap kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, agar nantinya kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya ini bisa berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya masih memiliki keluhan, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan masih kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya ini.

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan fungsi Perencanaan. Pola perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan membentuk program peningkatan produksi perikanan budidaya. Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Ir. Febdayenda, Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi sebagai berikut:

“...Perencanaan yang dilakukan diawali dengan musrembang dengan melibatkan masyarakat, kemudian hasilnya tersebut diteruskan ke masing-masing SKPD termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan akan menyaring rencana mana yang menjadi prioritas untuk nantinya diusulkan kepada tim anggaran Bappeda untuk bisa disahkan. Salah satu hasil dari rangkaian proses perencanaan tersebut adalah program peningkatan produksi perikanan budidaya ini”. (Hasil Wawancara dengan bapak Ir. Febdayenda, Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan. pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 13.00)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa perencanaan dari program peningkatan produksi perikanan budidaya ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu usulan dari masyarakat terkait Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya melalui musrenbang. Kemudian rencana program tersebut nantinya akan dipilih rencana mana yang menjadi prioritas untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dinas tersebut untuk satu tahun anggaran. Rencana kerja tersebut kemudian disusun kedalam program-program salah satunya yaitu Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tersebut.

Kasus lain yang terjadi adalah penyelewengan program bantuan bahwa program bantuan budidaya tersebut tidak tepat sasaran. Dalam perencanaannya program tersebut diperuntukkan bagi pokdakan malah masyarakat yang bukan pokdakan menikmati program bantuan tersebut. Untuk penanggungjawab

terhadap pelaksanaan percontohan perikanan budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan menunjuk Tim Teknis. Penetapan tersebut dikeluarkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan No.523/ /Kpts/BPT-PS/2015 tentang penetapan tim teknis kegiatan pengelolaan sistem perbenihan ikan, pengelolaan kawasan perikanan budidaya, pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan pada satuan kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menjalankan rencana yang telah disusun, Kepala Dinas memberikantugas kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan untuk membagi pelaksanaan program. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan membagi dan menyerahkan kegiatan-kegiatan yang ada didalam Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya ini kepada bidang yang sesuai dengan tupoksi bidang tersebut. Sesuai yang disampaikan oleh Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan bahwa :

“...Masing masing kegiatan yang ada pada program peningkatan produksi perikanan budidaya ini tanggungjawabnya ada pada Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan. Jadi dalam program peningkatan produksi perikanan budidaya ini yang melaksanakan kegiatannya hanya bidang pengelolaan pembudidaya ikan saja”. (Hasil Wawancara bapak Ir. Febdayenda, Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan. pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 13.00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya ini yang bertanggungjawabnya ada

pada Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan. Akan tetapi sumber daya yang terlibat langsung dalam program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya ini tidak semuanya memiliki kualifikasi yang semestinya. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

“...kebanyakan dari kami tidak mengerti seluruh proses manajemen program ini karena tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai perikanan maupun manajemen”.(Hasil Wawancara dengan bapak Ir. Febdayenda, Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan. pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 13.00)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan dari pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki kompetensi dalam bidang perikanan khususnya perikanan budidaya. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *the right man in the right place*. Dimana setiap orang harus ditempatkan menurut keahlian dan kecakapannya<sup>9</sup>. Pengorganisaian ini dirasa belum maksimal mengingat pegawai yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak mengerti dengan apa yang akan dikerjakan.

Dinas Perikanan dalam hal ini sebagai stakeholder terkait dengan keberhasilan program menjadi peran penting dalam keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi tidak hanya dituntut untuk mengejar tujuan semata, akan tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan cara efektif dan efisien<sup>10</sup>.

Selanjutnya dari sisi motivasi, program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya belum mendorong motivasi dengan maksimal, baik bagi pegawai

<sup>9</sup>Sondang P Siagian. *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara: Jakarta, 2003 hlm 7

<sup>10</sup>Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2015, hlm. 5

pelaksana dan pokdakan. Bentuk motivasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan kepada pegawai dan pokdakan dalam penyuluhan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan bisa dikatakan tidak ada. Hal tersebut sesuai hasil wawancara peneliti dengan Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan, yaitu

“...reward memang tidak ada pada Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan ini, karena memang tidak ada anggaran khusus yang di anggarkan untuk itu serta para pegawai merasa bahwa tugas pokok dan fungsi mereka memang harus tetap mereka jalankan juga walaupun tidak adanya reward yang diberikan. (Hasil Wawancara dengan bapak Ir. Febdayenda, Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan. pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 13.00)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa tidak ada *reward* yang diberikan dalam pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya ini. Tidak adanya pemberian *reward* ini dikarenakan memang tidak ada anggaran khusus yang diberikan oleh Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan untuk pemberian *reward* kepada para pegawai yang ada. Sehingga yang diterima oleh para pegawai hanya sebatas upah atau gaji yang seharusnya mereka terima saja. Para pegawai pun menganggap bahwa tidak adanya *reward* ini tidak begitu terpengaruh terhadap kinerja mereka dalam melaksanakan kegiatan pada program ini. Selain tidak adanya *reward* pada pelaksanaan program ini, bentuk motivasi lain seperti *punishment* hanya diberikan berupa peringatan peringatan saja. *Punishment* yang diberikan ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan, yaitu

“ ...Sedangkan kalau hukuman yang diberikan dalam pelaksanaan program ini baru hanya sebatas peringatan peringatan saja sampai

kepada pemberian sanksi tertentu, tapi tidak sampai kepada pemecatan atau pemotongan gaji pegawai tersebut. Karena untuk pegawai tetap memang bukan kewenangan dari Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan dan Dokumentasi sendiri untuk melakukan itu. (Hasil Wawancara dengan bapak Ir. Febdayenda, Kasi Peningkatan Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan. pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 13.00)

Penerapan sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dan bekerja tidak maksimal jika belum mengindahkan peringatan peringatan yang ada. Tapi hukuman yang diberikan hanya baru sebatas itu karena tidak adanya aturan baku yang mengharuskan pemberian hukuman ini. Belum adanya *reward* yang diterapkan pada program tersebut membuat pemotivasian yang ada belum begitu baik pada kantor ini.

Adapun dari sisi pengawasan dan evaluasi dilakukan setiap bulan oleh kepala dinas kepada setiap bidang yang ada pada Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan melalui laporan realisasi fisik dan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan, yang menyatakan bahwa :

“...Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu Kepala Dinas mengevaluasi setiap bidang bidang yang ada melalui laporan realisasi fisik dan keuangan, bagaimana pelaksanaan program program dari setiap bidang tersebut. Evaluasi ini dilakukan setiap bulan oleh Kepala Dinas. Walaupun dalam prakteknya masih ada oknum kelompok pembudidaya ikan yang menyalahgunakan bantuan yang kami berikan”. (Hasil Wawancara dengan bapak Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Bapak Dalmasar. pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 13.00).

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa *controlling* atau pengawasan yang dilakukan hanya untuk melengkapi dokumen-dokumen laporan realisasi fisik

dan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan kabupaten Pesisir Selatan. Pada program peningkatan produksi perikanan budidaya sendiri evaluasi dilakukan pada masing masing bidang yang berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan adanya pengawasan yang baik dari atasan kepada bawahan maka diharapkan akan tercipta komunikasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik nantinya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diatas maka peneliti tertarik melihat lebih dalam mengenai bagaimana proses manajemen yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan masalah tentang hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian dengan cara mempertimbangkan masalah yang terjadi dan membandingkan dengan yang seharusnya. Dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Manajemen Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

#### 1.4.1 Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen terutama fungsi-fungsi manajemen tentang *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *motivating* (pemberian motivasi) dan *controlling* (pengawasan), apa saja yang harus ada didalam menerapkan ilmu manajemen, sebab tanpa kita sadari apa yang kita perbuat dalam hidup ini menggunakan ilmu manajemen, terutama dalam bidang organisasi baik swasta maupun pemerintah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan bagi pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terutama pada Dinas Perikanan. Masukan tersebut berupa informasi serta input positif yang bisa mendorong pemerintah dalam menghasilkan kinerja yang optimal kedepannya untuk memberikan layanan yang optimal di daerah.

